

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Jember)**

Ulin Nuha

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

E-mail : 15nuha.ulina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan pemerintah daerah. Objek penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden 120 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of human resources, the utilization of information technology on the quality of local government reporting. The object of this research is the Regional Device Work Unit of Jember Regency. The technique of determining the sample using purposive sampling technique with the number of respondents 120 people. The type of data used is primary data with data collection using questionnaires. The technique of data analysis using multiple linear regression analysis using SPSS program. The results of this study indicate that the variable Competence of Human Resources and Utilization of Information Technology affect the Quality of Local Government Financial Statements.

Keywords: *Human Resources, Utilization of Information Technology and Quality of Local Government Financial Statement*

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang – barang publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Ulum, 2004).

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi - organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo, 2006). Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Begitu pula dengan entitas pemerintahan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi Pemerintahan dan Keuangan Daerah.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Teknologi informasi yang digunakan pemerintah daerah SIMDA dan SIPKD. SIMDA merupakan program aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi yang dimulai dari penganggaran, akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember pada tahun 2012 berhasil

memperoleh kenaikan opini dari WDP menjadi WTP. Namun pada tahun berikutnya yakni pada tahun 2013 opini yang diperoleh turun menjadi WDP, bahkan pada tahun 2014 LKPD Kabupaten Jember kembali memperoleh opini WDP. Baru pada tahun 2015 opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jember mengalami kenaikan opini yakni dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kenaikan opini WTP menunjukkan kenaikan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Lebih jauh lagi dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2006 – 2015 pemerintah kabupaten jember hanya dua kali memperoleh opini WTP, yakni pada tahun 2012 dan 2015. Hal ini menunjukkan masih perlu dilakukan perbaikan agar supaya laporan keuangan yang dihasilkan kualitasnya lebih baik lagi.

Fakta lain menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia pada SKPD Kabupaten Jember mempunyai latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari yang hanya lulusan SMA, D3, S1 sampai S2. Selain itu tidak semua pegawai bagian keuangan di SKPD Kabupaten Jember berlatar pendidikan akuntansi. Latar belakang pendidikan yang berbeda pasti akan berdampak dalam proses penyusunan laporan keuangan, karena kurangnya pengetahuan. Sementara dalam mengelola keuangan daerah, SKPD harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. SDM yang kompeten tersebut akan lebih mudah memahami logika akuntansi dengan baik. Pembuatan laporan keuangan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh pegawai yang membuat laporan keuangan tersebut memahami akuntansi.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya : Lilis Wijayanti (2017) menyatakan Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap Kualitas LKPD, SPI Dan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas LKPD, sedangkan Nurillah (2014) menyatakan Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan SPI berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian lain yang juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Lilis Setyowati, dkk (2016) menyatakan Peran Teknologi Informasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan Sumber Daya Manusia dan Peran Internal Audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan sedangkan Rahman (2015) menyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan teori, uraian diatas dan adanya inkonsistensi hasil dari penelitian terdahulu serta didukung fakta – fakta yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- b. Untuk menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

b. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dan akuntansi pemerintahan pada khususnya.

c. Pemerintah

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Kompetensi

Menurut Alain D. Mitrani, Spencer and Spencer yang dialih bahasakan oleh Surya Dharma (2005: 109) mengemukakan kompetensi adalah *an underlying characteristic's of an individual which is causally related to criterion referenced effective and or superior performance in a job or situation*. Artinya kurang lebih sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kerja individu dalam pekerjaannya.

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor: 46A Tahun 2003 (2004:47) tentang pengertian Kompetensi adalah: Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya profesional, efektif dan efisien.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar yang dimiliki atau bagian keberibadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif. Ketidakesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Ruang Lingkup Keuangan Daerah meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Komponen Laporan Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Secara umum, kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi didefinisikan sebagai “kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan (Hutapea dan Thoha, 2008). Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam dunia kerja meliputi :

1. Pengetahuan (*Knowledge*)
2. Keterampilan (*Skill*)
3. Sikap (*Attitude*)

Teknologi Informasi

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), Pengertian Teknologi Informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah diantaranya ada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di beberapa pemerintah daerah.

Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) merupakan program aplikasi komputer yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi yang dimulai dari penganggaran, akuntansi, dan pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara teritegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporannya. Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah ini adalah:

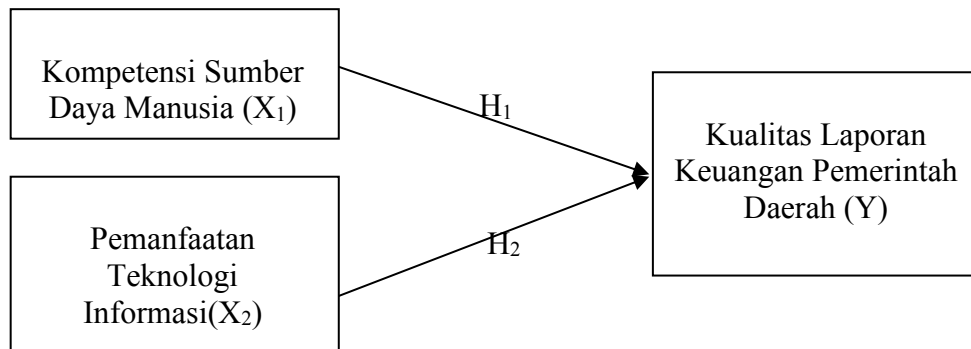
1. Menyediakan Data base mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
3. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
4. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tabel 2.1 Hasil Pengembangan SIMDA

1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan
2. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)
3. Program Aplikasi SIMDA Gaji
4. Program Aplikasi SIMDA Pendapatan
5. Sub Aplikasi Display SPP s.d SP2D
6. Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi
7. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran



H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori (*explanatory research*). Penelitian eksplanatori adalah penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek yaitu data yang dilaporkan sendiri oleh responden baik berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Sumber data yang dipakai adalah data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber asli.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan/ akuntansi pada Satuan Kerjan Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

Sampel dalam penelitian ini adalah 120 responden dari 40 Satuan Kerjan Perangkat Daerah di Kabupaten Jember .

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam melakukan penarikan sampel, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain pengambilan sampel *Porposive Sampling* yang merupakan pengumpulan informasi yang memenuhi kriteria sesuai dengan yang penulis kehendaki. Adapun kriteria yang dikehendaki adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai negeri sipil
- b. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan
- c. Pegawai yang berkerja sebagai kepala bagian dan staf bagian akuntansi/ keuangan di masing – masing SKPD (Kepala bagian/ kepala sub bagian keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran).
- d. Menjabat minimal 1 tahun.

Pemilihan kriteria sampel di dasarkan pada alasan bahwa:

- a. Kepala dan staf bagian keuangan merupakan pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan.

- b. Pegawai yang menjabat minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan berarti sudah mempunyai pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh peneliti berasal dari kuesioner, yakni teknik pengumpulan data dengan metode survei yang menggunakan pertanyaan kepada subyek penelitian secara tertulis.

Definisi Operasional Variabel

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai manusia yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Variabel kompetensi sumber daya manusia diukur dengan indikator :

1. Pengetahuan (*knowledge*)
2. Keahlian (*skill*)
3. Perilaku (*attitude*)

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jurnali dan Supomo, 2002) dalam Zuliarti (2013). Konstruk pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan :

1. Perangkat
2. Pengelolaan Data Keuangan
3. Perawatan

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan syarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan indikator :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji Validitas merupakan derajat hingga sejauh mana ketepatan dan ketelitian suatu alat ukur dalam mengukur gejala. Validitas dapat diartikan pula sebagai suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid dan sah mempunyai validitas yang tinggi, yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan tersebut sudah tepat. Teknik pengujian validitas menggunakan teknik korelasi *product moment* dari *pearson* dengan tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor total. Apabila nilai total *pearson correlation* > 0,3 atau probabilitas kurang dari 0,05 maka item tersebut valid.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian berperilaku mempunyai keandalan sebagai alatukur, diantaranya diukur melalui

konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak berubah. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach alpha*. Jika :

1. *Cronbach alpha* < 0,6 maka variabel tersebut kurang reliabel.
2. *Cronbach alpha* > 0,6 maka variabel tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Kriteria sebagai berikut : Menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov Test*

- a. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2005). Kriteria sebagai berikut :

1. Apabila nilai VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas
2. Nilai tolerance > 0,10 tidak terjadi multikolinieritas

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Kriteria sebagai berikut :

- a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.
- b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas

Analisis Regresi Berganda

Model persamaan Analisis Regresi Berganda untuk mengukur Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Keterangan :

- Y** = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 βX_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia
 βX_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
e = Standar error

Uji Hipotesis

Uji Statistik t (Pengujian Secara Parsial)

Uji statistik t digunakan untuk menguji secara individual pengaruh variable independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2001). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha < 5\%$), dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen).
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel dependen).

Uji Statistik F (Pengujian Secara Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha < 5\%$), dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (Variabel Independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen).
- Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima (Variabel Independen berpengaruh terhadap variabel dependen)

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2011). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai Koefisien Determinasi (R^2) berarti semakin tinggi kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi perubahan terhadap variabel dependent.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDM	85	58	95	76,15	6,354
TI	85	23	40	34,89	3,229
LKPD	85	59	80	69,11	5,069

Variabel dependen LKPD (Y) nilai minimum yang didapat sebesar 59, nilai maksimum sebesar 80, standar deviasi 5,069, dan rata-rata sebesar 76,15. Berdasarkan kategori penilaian dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berada pada rentang 68 – 80 atau di kategorikan sangat baik.

Variabel independen Kompetensi SDM (X_1) nilai minimum jawaban responden adalah sebesar 58, nilai maksimum sebesar 95, nilai standar deviasi sebesar 6,354, nilai rata-rata sebesar 76,15. Berdasarkan kategori penilaian dapat dinyatakan bahwa variabel kompetensi SDM berada pada rentang 65 – 79 atau di kategorikan baik.

Variabel independen TI (X_2) jumlah minimum yang didapat dari jawaban responden adalah sebesar 23, nilai maksimum sebesar 40, nilai standar deviasi sebesar 3,229, dan nilai rata-rata sebesar 34,89. Berdasarkan kategori penilaian dapat dinyatakan bahwa variabel pemanfaatan TI berada pada rentang 34 – 40 atau di kategorikan sangat baik.

Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	SDM1	0,413	0,000	Valid
	SDM2	0,584	0,000	Valid
	SDM3	0,617	0,000	Valid

SDM4	0,563	0,000	Valid
SDM5	0,452	0,000	Valid
SDM6	0,491	0,000	Valid
SDM7	0,746	0,000	Valid
SDM8	0,731	0,000	Valid
SDM9	0,651	0,000	Valid
SDM10	0,550	0,000	Valid
SDM11	0,525	0,000	Valid
SDM12	0,432	0,000	Valid
SDM13	0,473	0,000	Valid
SDM14	0,649	0,000	Valid
SDM15	0,696	0,000	Valid
SDM16	0,623	0,000	Valid
SDM17	0,631	0,000	Valid
SDM18	0,637	0,000	Valid

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	TI1	0,533	0,000	Valid
	TI2	0,834	0,000	Valid
	TI3	0,836	0,000	Valid
	TI4	0,765	0,000	Valid
	TI5	0,738	0,000	Valid
	TI6	0,550	0,000	Valid
	TI7	0,832	0,000	Valid
	TI8	0,498	0,000	Valid

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	LKPD1	0,705	0,000	Valid
	LKPD2	0,560	0,000	Valid
	LKPD3	0,397	0,001	Valid
	LKPD4	0,542	0,000	Valid
	LKPD5	0,542	0,000	Valid
	LKPD6	0,481	0,000	Valid
	LKPD7	0,627	0,000	Valid
	LKPD8	0,625	0,000	Valid
	LKPD9	0,543	0,000	Valid
	LKPD10	0,334	0,002	Valid
	LKPD11	0,585	0,000	Valid
	LKPD12	0,660	0,000	Valid
	LKPD13	0,539	0,000	Valid
	LKPD14	0,669	0,000	Valid
	LKPD15	0,653	0,000	Valid
	LKPD16	0,669	0,000	Valid

Seluruh item pertanyaan variabel dependen (kualitas laporan keuangan daerah), maupun pertanyaan dari setiap variabel independen (sumber daya manusia, pemanfaatan

teknologi informasi) seluruhnya dikatakan valid karena *pearson correlation* > 0,3 dan signifikansi < 0,05.

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sumber Daya Manusia	0,878	Reliable
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,858	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,850	Reliable

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian reliabel karena nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Variabel	Sig. (2-tailed)	Keterangan
X ₁ X ₂ , Y	0,328	Normal

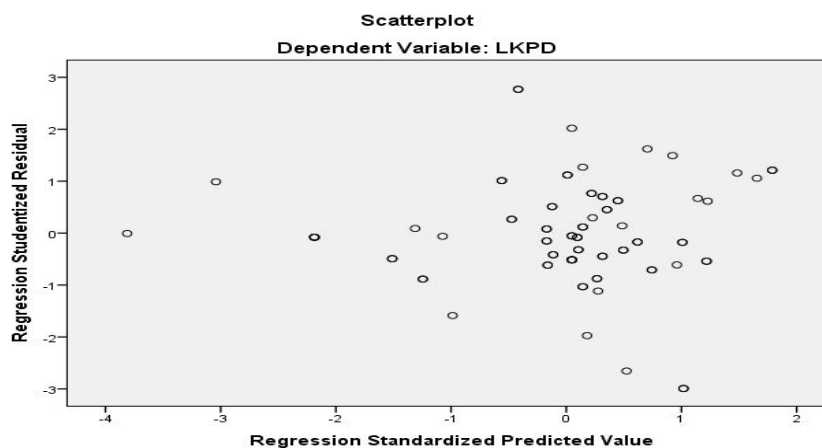
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai dari asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,328 > (0,05). Sehingga dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X ₁	0,928	1,078	VIF < 10 dan Tolerance > 0,10 Tidak
X ₂	0,928	1,078	Terjadi Mutikolienaritas

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam variabel SDM mempunyai nilai (VIF 1,078 < 10, Tolerance 0,928 > 0,10), TI mempunyai nilai (VIF 1,078 < 10, Tolerance 0,928 > 0,10) berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF dari setiap variabel independen lebih kecil dari 10, dan nilai Tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0,10.

Uji Heteroskedastisitas



Hasil analisis dari grafik *scatterplots* terlihat titik-titik mnryebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Koef. Regresi	t	Sig.
Konstanta	31,705	4,618	,000
Kompetensi SDM	0,226	2,901	,005
Pemanfaatan TI	0,578	3,765	,000

$$Y = 31,705 + 0,226 X_1 + 0,578 X_2$$

Penjelasan dari persamaan diatas adalah sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 31,705 hal ini menunjukkan bahwa nilai kualitas laporan keuangan daerah sebesar 31,705 apabila Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebesar nol (0) dengan asumsi bahwa nilai dari variabel yang lain konstan.
2. Koefisien regresi SDM adalah sebesar 0,226, artinya jika variabel SDM meningkat sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,226 satuan dan begitu juga sebaliknya jika variabel SDM menurun sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,226 satuan.
3. Koefisien regresi Pemanfaatan TI adalah sebesar 0,578, artinya jika variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,578 satuan dan begitu juga sebaliknya jika variabel pemanfaatan teknologi informasi menurun sebesar satu satuan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan menurun sebesar 0,578 satuan.

Uji Hipotesis

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Variabel	Signifikansi	Hasil
SDM	0,005	Berpengaruh Signifikan
TI	0,000	Berpengaruh Signifikan

- a. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel sumber daya manusia sebesar 0,005. Nilai signifikansi dari variabel sumber daya manusia lebih kecil dari nilai alpha ($0,005 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan variabel sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka H_1 diterima.
- b. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,000. Nilai signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi lebih kecil dari nilai alpha ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka H_2 diterima.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Variabel	Signifikansi	Hasil
X_1, X_2	0,000	Berpengaruh Signifikan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan yang dihasilkan adalah sebesar $0,000 < (0,05)$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen kompetensi sumber daya manusia (X_1) dan pemanfaatan teknologi informasi (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Uji Koefisien Determinasi (*adjusted R square*)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,530	0,281	0,264	4,249

Berdasarkan diatas diketahui bahwa nilai dari *adjusted Rsquare* adalah sebesar 0,264 atau sebesar 26,4%. Hal ini dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh variabel sumber daya manusia dan teknologi informasi sebesar 26,4%,

sedangkan sisanya sebesar 73,6% ($100\% - 26,4\% = 73,6\%$) merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

H₁ : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi 0,005 ($\alpha < 0,05$). Berdasarkan jawaban responden menunjukkan bahwa pengetahuan dan skill yang dimiliki sangat membantu dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik apabila kompetensi dari sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan keahlian yang mumpuni sesuai dengan bidangnya. Selain pengetahuan dan keahlian staf akuntansi/ keuangan juga harus mempunyai perilaku yang baik hal ini bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan seperti korupsi dan manupulasi.

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil uji regresi menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai signifikansi 0,000 ($\alpha < 0,05$). Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan volume yang besar. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, hal ini bisa meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik dan bisa digunakan oleh para penngunanya sebagai dasar pengambilan keputusan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Artinya bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna karena memiliki keterbatasan penelitian, diantaranya:

1. Penelitian ini tidak dapat mencapai keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Jember. Sehingga ada kemungkinan hasil penelitian yang diharapkan belum maksimal.
2. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara. Ada baiknya pengumpulan data dilengkapi dengan daftar pertanyaan lisan melalui wawancara.

Saran

1. Bagi pemerintah kabupaten jember untuk melakukan pengembangan kapasitas SDM secara berkesinambungan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap aparatur pengelola keuangan, sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa mendapatkan data secara keseluruhan dari semua dinas/badan/kantor yang ada, agar hasil yang didapat lebih maksimal.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat melengkapi metode penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara langsung serta menambah variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" Dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat : Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 N0. 02. Hal. 18-30.
- Andini, Dewi. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi I Vol. 24 No. 1 Juni 2015.
- Anthony, Robert N. dan Vijay Govindarajan.2005. *Management Control Systems*.Salemba Empat, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Erlangga, Yogyakarta.
- BPK RI, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2015, <http://www.bpk.go.id>. Akses 28 April 2016.
- FaristinaRosalin. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum*, Studi pada BLU di Kota Semarang.Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* . Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate dengan SPSS*.BP UNDIP, Semarang.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hamzah, Ardi. 2009.*Evaluasi Kesesuaian Model Keperilakuan dalam Penggunaan Teknologi Informasi di Indonesi*.Universitas Trunojoyo, Yogyakarta.
- Haza, Irfan Ikhwanul. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*.Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.

- Humairoh, Iftitah Dian. 2013. ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*** Artikel Ilmiah Mahasiswa 2013.
- Hutapea, Parulian Dan Nurianna Thoha. 2008. ***Kompetensi Plus.*** PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. 1999. ***Metodologi Penelitian Bisnis.*** Andi, Yogyakarta.
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian No. 46A Tahun 2003 tentang Kompetensi Pegawai
- Mahmudi. 2011. ***Manajemen Keuangan Daerah.*** Erlangga, Jakarta.
- Nasaruddin. 2008. ***Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi pada PT Bank NegaraIndonesia Tbk.*** Jurnal Ichsan Gorontalo Vol 3, no. 1.
- Nurillah, As Syifa. 2014. ***Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*** Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. UNDIP Semarang
- Mardiasmo. 2006. ***Akuntansi Sektor Publik.*** Andi, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 232 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Pratiwi, Dian Ririh. 2016. ***Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.*** KINERJA, Volume 20, No. 02, Th.2016 : Hal. 179 – 191
- Rahman, Dicky. 2015. ***Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.*** Jom FEKOM Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
- Sekaran, uma. 2006. ***Research Methods For Business.*** Salemba Empat, Jakarta

Sutaryo. 2011. *Nilai Laporan Keuangan Pemerintah Dengan E-Government System*.<http://sutaryofe.staff.uns.ac.id>

Surya, dharma. *Manajemen Kinerja*. Pustaka Pelajar, Jakarta.

Syarifudin, Akhmad. 2014. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Jurnal Fokus Bisnis, Vol. 14 No. 02 Desember 2014

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Ulum, Ihyaul, MD., 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Wijayanti, Lilis. 2017. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah, Surakarta.

Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, & Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.

www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/versi2.1bpkp

www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-tujuanteknologi-informasi.html

www.kemendagri.go.id

Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi. Universitas Muria Kudus, Kudus.